

Laporan Bulanan

Direktorat Ketersediaan Pangan

FEBRUARI

2023

Direktorat Ketersediaan Pangan
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
Badan Pangan Nasional
Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat-Nya penyusunan **"Laporan Bulan Februari Capaian Kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2023"** dapat diselesaikan.

Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Ketersediaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang ketersediaan pangan dan sebagai komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, dan akuntabel guna mendukung akuntabilitas.

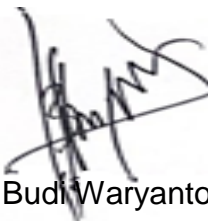
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Ketersediaan Pangan telah menyusun Laporan Kinerja Bulan Februari Tahun 2023 yang berisikan program dan kegiatan ketersediaan pangan yang dilaksanakan pada bulan Februari 2023 sebagai bentuk implementasi atas Rencana Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Dalam laporan ini dan kami menyadari belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran konstruktif untuk perbaikan pelaksanaan tugas pada periode berikutnya sangat diharapkan.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan.

Jakarta, Maret 2023

Direktur Ketersediaan Pangan,



Dr. Ir. Budi Waryanto, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Direktorat Ketersediaan Pangan mempunyai tugas dalam melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan.

Sesuai dengan DIPA Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2023, Direktorat Ketersediaan Pangan melaksanakan kegiatan dalam 4 (empat) KRO dengan 4 (empat) Output dengan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.005.018.000,- (Empat Miliar Lima Juta Delapan belas Ribu Rupiah).

Hasil dari pemantauan dan evaluasi dan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan Februari Tahun 2023 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Direktorat Ketersediaan Pangan posisi bulan Januari tahun 2023

Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan pada output/RO dan komponen lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan posisi bulan Februari Tahun 2023 sebagaimana tabel di atas, realisasi anggaran per bulan Februari Tahun 2023 berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan mencapai Rp. 1.638.469.000,- atau 40,91% dari alokasi anggaran sebesar Rp.4.005.018.000,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan target bulan Februari Tahun 2023 sebesar Rp. 200.250.000,- realisasi mencapai 818,21%. Tingginya realisasi pada bulan tersebut disebabkan terjadinya peningkatan pengajuan dokumen keuangan.

Pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Ketersediaan Pangan selama bulan Februari Tahun 2023 untuk memenuhi target output dan capaian outcome. Capaian kinerja realisasi keuangan sudah cukup baik bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Namun capaian serapan melebihi target tersebut dapat berdampak pada perencanaan kegiatan periode selanjutnya.

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan tetap berjalan sesuai rencana operasional, dan mempercepat realisasi anggaran dengan pemenuhan dokumen pendukung pada periode bulan selanjutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Metodologi Penyusunan Laporan	2
BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT	3
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	4
3.1. Realisasi Fisik dan Keuangan	4
3.2. Monitoring Kegiatan Prioritas	6
BAB IV PENUTUP	17
4.1. Kesimpulan	17
4.2. Permasalahan	17
4.3. Rekomendasi	17

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Target Fisik dan Keuangan Bulan Februari Sesuai DIPA Revisi ke-2 Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2023	3
2	Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Februari Tahun 2023 Per Output dan Komponen Lingkup Badan Pangan Nasi	4
3	Realisasi Keuangan Bulan Februari Tahun 2023 Per Kegiatan Lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan.	5
4	Prognosa Neraca Pangan Periode Januari-Desember 2023 (Update Bulan Februari 2023)	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Pertemuan Pembahasan Hasil Survey Stok Beras di Penggilingan	6
2	Rapat Finalisasi Data Survey Stok Beras Akhir Tahun 2022	6
3	Rapat Updating Prognosa Data Neraca Pangan Bulan Februari 2023	7
4	Rapat pembahasan RPerbadan tentang Ekspor Impor Pangan	10
5	Rapat Koordinasi Pembahasan Perubahan Peraturan Presiden (Perpres) No.32/2022 tentang Neraca Komoditas dan Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.	12
6.	Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pangan Nasional dengan Badan Pusat Statistik	14

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Direktorat Ketersediaan Pangan mempunyai tugas dalam melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan. Kegiatan tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) KRO dengan 4 (empat) Output berdasarkan DIPA Nomor: SP.DIPA-125.01-0/2023 untuk unit organisasi (125.01) Direktorat Ketersediaan Pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.005.018.000,- (Lima Miliar Lima Juta Delapan belas Ribu Rupiah).

Hasil dari pemantauan dan evaluasi dan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan Februari Tahun 2023 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Direktorat Ketersediaan Pangan posisi bulan Februari tahun 2023. Laporan ini sebagai catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan selama bulan Februari Tahun 2023 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output Direktorat Ketersediaan Pangan tahun 2023 baik fisik maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.1 Tujuan

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan posisi bulan Februari Tahun 2023.

2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target pada bulan Februari Tahun 2023

1.2 Metodologi Penyusunan Laporan

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, KRO dan Output UKE 2 dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

BAB II

RENCANA KINERJA OUTPUT

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan selama tahun 2023. Rencana kinerja output pada bulan Februari tahun 2023 akan dilihat dari dukungan pencapaian output/RO dan komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA Revisi ke-2 pada bulan Februari Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 5%. Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Februari Sesuai DIPA Revisi ke-2 Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2023

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Alokasi Tahun 2023		Target Bulan Februari Th. 2023	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan 5% (Rp)	Fisik
HA-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas						
6875-Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	904.438.000	1 rekomendasi kebijakan	45.221.900	0
AEA-Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	671.675.000	1 kegiatan	33.583.750	0
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Ketersediaan Pangan	Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan	928.905.000	6 NSPK	46.445.250	0
QMA - Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	1.500.000.000	1 Data	75.000.000	1 Data

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

III.1. Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2023, Direktorat Ketersediaan Pangan akan melaksanakan kegiatan dalam 4 (empat) KRO dengan 4 (empat) Output dengan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.005.018.000,- (Lima Miliar Lima Juta Delapan belas Ribu Rupiah),-. Realisasi keuangan pada bulan Februari Tahun 2023 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan disajikan per kegiatan lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan sebagaimana tabel 2 berikut:

Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Februari Tahun 2023 Per Output dan Komponen Lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			TARGET (5%)		REALISASI	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
HA-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			200.250.900		1.638.469.000	
6875-Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			200.250.900		1.638.469.000	
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	45.221.900	1 rekomendasi kebijakan	36.090.000	0
AEA-Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	33.583.750	1 kegiatan	245.989.000	0
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Ketersediaan Pangan	Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan	46.445.250	6 NSPK	0	0

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			TARGET (5%)		REALISASI	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
QMA - Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	75.000.000	1 Data	1.356.390.000	1 Data

Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan pada output/RO dan komponen lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan posisi bulan Februari Tahun 2023 sebagaimana tabel di atas, realisasi anggaran per bulan Februari Tahun 2023 berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan mencapai Rp. 1.638.469.000,- atau 40,91% dari alokasi anggaran sebesar Rp.4.005.018.000,-. Sedangkan jika dibandingkan dengan target bulan Februari Tahun 2023 sebesar Rp. 200.250.000,- realisasi mencapai 818,21%. Rincian per kegiatan sebagaimana tabel 3 berikut.

Tabel 3. Realisasi Keuangan Bulan Februari Tahun 2023 Per RO/Output Lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan

Kegiatan dan RO/Output	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6875-Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	200.250.900	1.638.469.000	818,21
Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	45.221.900	36.090.000	79,81
Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	33.583.750	245.989.000	732,46
NSPK Ketersediaan Pangan	46.445.250	0	0
Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	75.000.000	1.356.390.000	1.808,52

Dari tabel 3 diatas, realisasi keuangan ter-tinggi pada bulan Februari tahun 2023 pada RO/Output Data dan Informasi Ketersediaan Pangan dengan capaian 1.808,52%, dan realisasi ter-rendah pada Ro/Output Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan dengan capaian 0%.

III.2. Monitoring Kegiatan Prioritas

Hasil monitoring kegiatan prioritas Direktorat Ketersediaan Pangan selama bulan Februari Tahun 2023 sesuai dengan capaian realisasi keuangan sebagaimana tabel 3, kegiatan fisik Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Ketersediaan Pangan. Pada periode bulan Februari Tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan prioritas Direktorat Ketersediaan Pangan, dengan kegiatan sbb:

1) Pertemuan Pembahasan Hasil Survey Stok Beras di Penggilingan

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2023 di ruang rapat Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Pertemuan dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan, dan dihadiri oleh Direktur Metodologi Sensus Direktur Pengembangan Metodologi Survey dan Sensus BPS, Perwakilan Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS, tim dari BPS, serta tim dari Badan Pangan Nasional. Hasil perhitungan stok beras di penggilingan sebanyak 707.984 ton. Data stok di penggilingan *outlier* yang disandingkan dengan data SCBN bulan Juni 2022 dan data KSA bulan Desember 2022 sudah dikonfirmasi ke lapangan dimana ada beberapa perbaikan dan sudah diserahkan ke Tim pengolahan BPS. Salah satu uji petik kelapangan oleh tim dari Bapanas adalah Penggilingan Padi Subur Makmur di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Setelah ada perbaikan data dari lapangan dilakukan perhitungan ulang oleh Tim BPS, sehingga didapatkan data stok beras dipenggilingan sebesar **694.138** ton dengan RSE penggilingan menengah sebesar 11,38% dan penggilingan besar sebesar 15,36%.

2) Rapat Finalisasi Data Survey Stok Beras Akhir Tahun 2022

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2023 bertempat di Hotel Aston Prority Simatupang Hotel dan Coference Center. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, dan dihadiri oleh Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Deputy Bidang Statistik Produksi BPS, Direktur Metodologi Sensus dan Survei BPS, Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan BPS, Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, dan Pejabat pendamping lainnya. Survey stok beras akhir tahun 2022 dilakukan pada unit observasi di Rumah Tangga sebanyak 11.022 sampel dan Non Rumah Tangga sebanyak 21.213 sampel. Sampel di Rumah Tangga dibagi menjadi, yaitu Rumah Tangga Produsen sebanyak 5.989 sampel dan Rumah Tangga Konsumen sebanyak 5.033 sampel. Sedangkan Sampel di Non Rumah Tangga terdiri dari Penggilingan Padi sebanyak 3.756 sampel, Pedagang beras 7.070 sampel, Industri 2.624 sampel, Horeka 7.563 sampel, dan Bulog (seluruh divisi regional Bulog). Berdasarkan hasil pengolahan data Survei Stok Beras Akhir Tahun 2022 diperoleh hasil estimasi stok beras nasional pada Tanggal 31 Desember 2022 sebesar 4.064.238 ton dengan rincian sebagai berikut; a) di Rumah Tangga (Produsen dan Konsumen) 2.347.591 ton; b) Pedagang sebanyak 500.253 ton; c) Penggilingan sebanyak 693.373 ton, d) Horeka dan Industri sebanyak 187.324 ton; e) Bulog sebanyak 335.697 ton.



Gambar 1. Rapat Pembahasan Finalisasi Data Survey Stok Beras Akhir Tahun 2022

3) Rapat Updating Prognosa Data Neraca Pangan Bulan Februari 2023

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023 bertempat di IPB International Convention Center Bogor. Pertemuan dibuka oleh Koordinator Kelompok Neraca Pangan dihadiri oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BPS dan Direktorat Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka *updating* data untuk penyusunan Prognosa

Neraca Pangan yang dilakukan setiap bulan. Berdasarkan hasil rapat diperoleh prognosa neraca pangan update Bulan Februari sebagai berikut :

a. Beras

Ketersedian beras tahun 2023 sebesar 36.460.787 ton dan kebutuhan sebesar 30.970.759 ton atau 2.580.897 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun 2023 terdapat surplus sebesar 5.490.028 ton, dengan ketahanan stok selama 66 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023

b. Jagung

Ketersedian Jagung tahun 2023 sebesar 21.784.094 ton dan kebutuhan sebesar 16.450.593 ton atau 2.580.897 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun 2023 mencapai 1.361.438 ton, dengan ketahanan stok selama 121 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023

c. Kedelai Biji Kering

Ketersedian kedelai biji kering tahun 2023 sebesar 2.954.696 ton dan kebutuhan sebesar 2.768.610 ton atau 230.718 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun 2023 mencapai 186.085 ton, dengan ketahanan stok selama 25 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023

d. Bawang Merah

Ketersedian bawang merah tahun 2023 sebesar 1.328.158 ton dan kebutuhan sebesar 1.194.060 ton atau 99.505 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun 2023 mencapai 134.098 ton, dengan ketahanan stok selama 42 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023

e. Bawang Putih

Ketersedian bawang putih tahun 2023 sebesar 750.569 ton dan kebutuhan sebesar 651.799 ton atau 54.317 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun 2023 mencapai 98.770 ton, dengan ketahanan stok selama 56 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023

f. Cabai Besar

Ketersedian cabai besar tahun 2023 sebesar 1.612.094 ton dan kebutuhan sebesar 936.372 ton atau 78.031 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun

2023 mencapai 49.506 ton, dengan ketahanan stok selama 20 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023

g. Cabai Rawit

Ketersedian cabai rawit tahun 2023 sebesar 1.590.802 ton dan kebutuhan sebesar 1.090.187 ton atau 90.849 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun 2023 mencapai 30.442 ton, dengan ketahanan stok selama 10 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023

h. Daging Sapi/Kerbau

Ketersedian daging sapi/kerbau tahun 2023 sebesar 879.632 ton dan kebutuhan sebesar 815.651 ton atau 67.971 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun 2023 mencapai 63.980 ton, dengan ketahanan stok selama 29 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023

i. Daging Ayam Ras

Ketersedian daging ayam ras tahun 2023 sebesar 4.162.934 ton dan kebutuhan sebesar 3.507.754 ton atau 292.313 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun 2023 mencapai 655.180 ton, dengan ketahanan stok selama 69 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023

j. Telur Ayam Ras

Ketersedian telur ayam ras tahun 2023 sebesar 6.125.420 ton dan kebutuhan sebesar 5.883.434 ton atau 490.286 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun 2023 mencapai 241.986 ton, dengan ketahanan stok selama 15 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023

k. Gula Konsumsi

Ketersedian gula konsumsi tahun 2023 sebesar 4.701.517 ton dan kebutuhan sebesar 3.401.521 ton atau 283.460 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun 2023 mencapai 1.299.996 ton, dengan ketahanan stok selama 142 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023

l. Minyak Goreng

Ketersedian minyak goreng tahun 2023 sebesar 6.946.900 ton dan kebutuhan sebesar 6.586.900 ton atau 548.908 ton/bulan, sehingga neraca pada akhir tahun

2023 mencapai 360.000 ton, dengan ketahanan stok selama 20 hari kedepan setelah akhir bulan Desember 2023

Tabel 4. Prognosa Neraca Pangan Periode Januari-Desember 2023 (Update Bulan Februari 2023)

Uraian	Keterangan	Beras	Jagung	Kedelai	Bawang Merah	Bawang Putih	Cabai Besar
Stok Awal 2023	A	4,064,238 a)	3,293,210 a)	162,000 b)	c)	143,621 d)	c)
Perkiraan Produksi DN	B	31,919,504	16,871,391	360,989	1,328,158	19,176	1,612,094
Realisasi Impor Januari 2023	C	298,371	97,489	218,518		1,538	
Rencana Impor Feb-Des 2023	D	178,674	1,734,654	2,213,189		586,234	
Realisasi Ekspor Januari 2023	E		94				
Rencana Ekspor Feb - Des 2023	F		212,556				
Total Ketersediaan	G=A+B+C+D+E+F	36,460,787	21,784,094	2,954,696	1,328,158	750,569	1,612,094
Kebutuhan (Tahunan)	H	30,970,759 a)	16,450,593	2,768,610	1,194,060	651,799	936,372
Kebutuhan (Bulanan)	I	2,580,897	1,361,438	230,718	99,505	54,317	78,031
Stok Akhir Desember 2023	J = G - H	5,490,028	5,333,501	186,085	134,098	98,770	49,506
Ketahanan Stok (Hari)	K= J/I*31	66	121	25	42	56	20

Uraian	Keterangan	Cabai Rawit	Daging Sapi/Kerbau	Daging Ayam Ras	Telur Ayam Ras	Gula Konsumsi	Minyak Goreng
Stok Awal 2023	A	c)	56,444	150,489 e)	43,907	1,110,517 a)	349,300 d)
Perkiraan Produksi DN	B	1,590,802	504,779	4,012,445	6,081,513	2,600,000 a)	6,597,600
Realisasi Impor Januari 2023	C		12,322			67,959	
Rencana Impor Feb-Des 2023	D		306,087			923,041	
Realisasi Ekspor Januari 2023	E						
Rencana Ekspor Feb - Des 2023	F						
Total Ketersediaan	G=A+B+C+D+E+F	1,590,802	879,632	4,162,934	6,125,420	4,701,517	6,946,900
Kebutuhan (Tahunan)	H	1,090,187	815,651	3,507,754	5,883,434	3,401,521	6,586,900
Kebutuhan (Bulanan)	I	90,849	67,971	292,313	490,286	283,460	548,908
Stok Akhir Desember 2023	J = G - H	30,442	63,980	655,180	241,986	1,299,996	360,000
Ketahanan Stok (Hari)	K= J/I*31	10	29	69	15	142	20

Sumber : BPS, Kementan, dan SINAS-NK Kemenko Perekonomian diolah Badan Pangan Nasional Update 10 Januari 2023

4) Rapat pembahasan RPerbadan tentang Ekspor Impor Pangan

Rapat Pembahasan Rancangan Perbadan Ekspor dan Impor Pangan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023 di Hotel The Margo Depok. Pertemuan dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan dan dihadiri oleh Kepala Biro OSH Badan Pangan Nasional, Direktur Bapokting Kemendag, dan perwakilan Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian, Asdep Pangan Kemenko Perekonomian, Biro Hukum Kemendag, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag, Direktorat Impor Kemendag, Direktorat Perumusan Stándar dan Mutu Pangan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Badan Pangan Nasional. Beberapa poin rapat sebagai berikut:

- Pertemuan bertujuan membahas draft awal Rancangan Perbadan terkait perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan,

sebagai payung hukum amanat Perpres No.66/2021 tentang Badan Pangan Nasional Pasal 28 ayat 1 (b) bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan mendelegasikan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional dalam hal perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan.

- b) Penyusunan RPerbadan perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan mengacu pada Perpres No.32/2022 tentang Neraca Komoditas dan Perpres No.125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, serta menyelaraskan dengan Peraturan Menteri Perdagangan atau peraturan perundang-undangan lain terkait kebijakan ekspor dan impor.
- c) Perlu diperjelas pendelegasian kewenangan dari Kemendag ke Badan Pangan Nasional, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan. Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional tidak melaksanakan tata kelola administrasi dan penerbitan persetujuan impor (PI) dan persetujuan ekspor (PE).



Gambar 2. Rapat Pembahasan RPerbadan Ekport dan Impor Pangan

- d) Draft RPerbadan mencakup antara lain:
 - Jenis komoditas: Beras, jagung, Kedelai, Gula, Bawang (Bawang.merah, Bawang putih), Cabai (Cabe.merah, Cabe rawit), Daging Lembu, Daging Unggas, Telur, Ikan, Minyak Goreng, Tepung Terigu, Garam.

- Mekanisme penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan, yang mengacu pada proses bisnis neraca komoditas, baik yang ditetapkan melalui Rakortas, yang tidak ditetapkan melalui Rakortas dan barang bebas, seperti kedelai.
 - Rekomendasi untuk penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan berdasarkan neraca pangan Badan Pangan Nasional serta laporan realisasi ekspor dan impor tahun sebelumnya.
 - Pelaporan realisasi ekspor dan impor pangan, yang datanya akan diambil dari sistem elektronik terintegrasi yang sudah ada di Kemendag (Inatrade) dan LNSW Kemenkeu (Sinan NK).
 - Penetapan kode HS sesuai dengan peraturan perundangan terkait.
 - Penetapan penugasan impor kepada Perum Bulog dan BUMN pangan.
 - Penetapan volume dan waktu ekspor dan impor pangan sesuai dengan kondisi waktu panen dan musim paceklik di dalam negeri, serta lokasi pelabuhan masuk dan pendistribusian pangan yang masuk ke wilayah-wilayah defisit.
 - Pemantauan stok di gudang importir dan BUMN pangan.
 - Persyaratan keamanan dan mutu pangan yang diimpor dan yang diekspor.
 - Monitoring dan evaluasi kebijakan ekspor dan impor pangan.
- e) Pembahasan draft RPerbadan dengan K/L terkait harus sudah jelas dan *clear* sebelum dibahas dalam pertemuan harmonisasi dengan Kemenkumham.
- f) Draft RPerbadan akan diperbaiki dan dilengkapi berdasarkan masukan pada pertemuan dan akan dibahas pada pertemuan berikutnya.

5) Rapat Koordinasi Pembahasan Perubahan Peraturan Presiden (Perpres) No.32/2022 tentang Neraca Komoditas dan Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Pertemuan dipimpin oleh Asdep Pengembangan Industri Kemenko Bidang Perekonomian, dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemenperin, Kemendag, KKP, Kementan, Kementerian ESDM, BPS, dan Badan Pangan Nasional. Pertemuan dalam rangka menindaklanjuti hasil Rakortas Pembahasan Neraca Komoditas non pangan pada tanggal 25 Januari 2023

untuk membahas usulan perubahan Perpres No.32/2022 tentang Neraca Komoditas dan Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. Ijin prakarsa revisi peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2/2022 tentang Cipta Kerja (Perppu CK) telah disampaikan melalui surat Menko Bidang Perekonomian kepada Presiden pada tanggal 26 Januari 2023. Salah satu pertimbangan adanya kegentingan yang memaksa dalam rangka penetapan Perppu CK adalah menyelesaikan hambatan regulasi dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha. Target penyelesaian revisi paling lama satu bulan. Identifikasi usulan perubahan dalam PP No.28/2021, antara lain:

- Harmonisasi kode HS sesuai BTKI tahun 2022 (Lampiran)
- Penyempurnaan mekanisme perlakuan data yang ditetapkan NK-nya, terkait penetapan NK secara otomatis dan kondisi saat NK belum dapat ditetapkan (Pasal 11 dan 12)
- Penyempurnaan penetapan rencana kebutuhan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 14 ayat 3)
- Penyempurnaan pelaksanaan impor bahan baku dan/atau bahan penolong non IKM oleh API-U, tidak lagi dibatasi untuk API-P (Pasal 19 ayat 1).
- Penambahan pasal diskresi, yang mengacu pada ketentuan diskresi pada PP No.5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Penyampaian usulan kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong disampaikan melalui sistem elektronik terintegrasi, tidak terbatas Sinas NK (Pasal 15 ayat 3).
- Penyempurnaan definisi data yang tersedia diperluas, tidak hanya dari K/L non kementerian (Pasal 18).
- Penambahan pasal terkait penumbuhan investasi industri yang memberikan nilai tambah masuk ke Indonesia.
- Standardisasi produk diperluas, tidak hanya bagi kegiatan usaha dengan risiko tinggi (Pasal 35 ayat 1).

Identifikasi usulan perubahan dalam Perpres No.32/2021, antara lain:

- Perubahan nomenklatur SNANK, diubah menjadi SInas NK (Pasal 1 dan pasal lain)
- Penahapan implementasi neraca komoditas: penetapan NK melalui Rakor Menteri untuk bahan kebutuhan pokok dan barang penting, serta penetapan NK otomatis tanpa melalui Rakor Menteri dan ditentukan oleh masing-masing Pembina sektor untuk komoditas non bahan kebutuhan pokok dan barang penting (Pasal 16)
- Mekanisme penetapan perubahan neraca komoditas secara otomatis, oleh K/L Pembina sektor tanpa melalui Rakor (Pasal 22 ayat 2 huruf b)
- Penyempurnaan pengaturan terkait Pembina sektor komoditas (Pasal 30)
- Penyempurnaan pengaturan ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ekspor impor komoditas yang belum tersedia NK-nya (Pasal 33)
- Rollback, terkait dengan input elemen data Kode HS sesuai dengan uraian barangnya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
- Lain-lain, terkait money dan eksekusi PI/P

Pembahasan legal drafting pasal per pasal akan diagendakan pada pertemuan berikutnya.

6) Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pangan Nasional dengan Badan Pusat Statistik.

Rapat pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pusat Statistik pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, bertempat di Hotel Salak Heritage Bogor. Rapat dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan, dan dihadiri oleh Direktur Metodologi Sensus Direktur Pengembangan Metodologi Survey dan Sensus BPS, Direktur Kerawanan Pangan dan Gizi, Bapanas. Kepala Biro Organisasi, SDM dan Hukum Bapanas, Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Bapanas, Perwakilan Direktorat Sistem Informasi Statistik BPS, Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS, Perwakilan Direktur Diseminasi Statistik BPS, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum BPS, Perwakilan Direktorat Distribusi dan

Cadangan Pangan, Perwakilan Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Bapanas, Perwakilan Biro Perencanaan Kerjasama dan Humas Bapanas, dan Fungsional Direktorat Ketersediaan Pangan. Rapat diselenggarakan dalam rangka membahas draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Pemanfaatan Data Informasi Statistik di Bidang Pangan. PKS adalah sebagai tindak lanjut dari MoU yang sudah dilaksanakan antara Bapanas dengan BPS yang berlaku selama 5 tahun.

Untuk Tahap 1 (satu) akan dibuat PKS yang ditandatangani oleh Sestama Bapanas dan Sestama BPS yang di fokuskan ke pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi statistik bidang pangan, sedangkan untuk pembahasan PKS terkait SDM, seperti pelatihan stastitisi dan pranata komputer akan dilakukan oleh Biro OSH, Bapanas. Terkait pemanfaatan data dan informasi statistik BPS yang sudah rilis, Kementerian/Lembaga dapat mengajukan PNBK Rp 0 kapan saja tanpa harus menyusun PKS. Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan PKS akan dibebankan kepada pihak pertama (Bapanas). Badan Pangan Nasional segera membuat surat perihal tindak lanjut penyusunan PKS kepada Sestama BPS dan merancang matriks kebutuhan data setiap Deputi lingkup Bapanas yang akan dituangkan dalam ruang lingkup PKS.

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan pada periode bulan Februari Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) KRO dengan 4 (empat) Output berdasarkan DIPA Direktorat Ketersediaan Pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.005.018.000,- (Empat Miliar Lima Juta Delapan belas Ribu Rupiah),- yang dialokasikan untuk mendukung Program Ketersediaan.
2. Realisasi keuangan pada bulan Februari Tahun 2023 mencapai Rp. 1.638.469.000,- atau capaian presentasi 40,91% dengan pagu Rp. 4.005.018.000,-, dan mencapai 818,21% dengan pagu 5% sesuai target lembar ke-III DIPA yaitu sebesar Rp. 200.250.900,-.
3. Realisasi fisik sampai bulan Februari sesuai target pencapaian Output/RO Tahun 2023 adalah: 1 Dokumen pada komponen Data dan Informasi Ketersediaan Pangan.

IV.2. Permasalahan

Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Ketersediaan Pangan selama bulan Februari Tahun 2023 untuk memenuhi target output dan capaian outcome. Capaian kinerja realisasi keuangan juga sudah cukup baik bahkan melampaui target yang telah ditetapkan sesuai lembar ke-III DIPA Badan Pangan Nasional. Namun capaian serapan melebihi target tersebut dapat berdampak pada perencanaan kegiatan periode-periode selanjutnya.

IV.3. Rekomendasi

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan selama bulan Februari Tahun 2023 tetap berjalan sesuai rencana operasional, dan untuk

realisasi keuangan perlu dipertahankan pada periode bulan selanjutnya serta mengatur kembali perencanaan kegiatan berdasarkan target capaian bulanan.